

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	2
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :

Radar Sampit	Halaman : 06
--------------	--------------

Kompas	Kalteng Pos ✓	Borneo News
Palangka Post	Tabengan	

Opini WTP Tak Jamin Laporan Keuangan Bebas dari Temuan

PALANGKA RAYA-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar coffe morning bersama media, di halaman kantor BPK, Rabu (12/10). Dalam giat ini tugas dan fungsi BPK yang banyak didiskusikan.

Kepala BPK Perwakilan Kalteng Ali Asyar saat sesi diskusi, menyampaikan, biasanya BPK akan melakukan audit atas laporan keuangan yang disampaikan pemerintah daerah. Hasil audit BPK tersebut akan menghasilkan empat klasifikasi opini antara lain, wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW), dan tidak memberikan pendapat (TMP).

"Empat klasifikasi tersebut menjadi pengukur kualitas pelaporan keuangan suatu daerah terdapat kejanggalan atau tidaknya," jelasnya.

Laporan keuangan suatu daerah

dinyatakan minim kejanggalan jika setelah diperiksa oleh BPK membuahkan opini audit dengan kategori WTP. Kategori tersebutlah yang menyatakan laporan keuangan absah dan minim kejanggalan. Kriteria untuk menentukan laporan keuangan suatu daerah pantas mendapatkan WTP yaitu dengan mempertimbangkan dari kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

"Semua daerah di Kalteng mendapatkan WTP sehingga secara umum sudah bagus," ucapnya.

Ali mengatakan pemeriksaan keuangan tidak didesain untuk menemukan kecurangan. Untuk itu, ketika suatu daerah mendapatkan opini WTP, hal itu tidak menjamin daerah itu tak ada temuan atau bebas dari

Sambungan

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	2
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah

Media :	Radar Sampit	Halaman :
Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	Tabengan	

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

korupsi. Hal ini karena BPK memiliki tugas terbatas pada pemeriksaan pelaporan keuangan saja.

“Walaupun laporan keuangan suatu daerah sudah WTP, itu tidak menjamin tidak ada ‘temuan’, masalah itu mungkin akan tetap ada, tapi tidak signifikan,” tuturnya. Untuk itu, ketika ada anggaran yang tidak sesuai dengan hasil pelaporan, jika itu kelebihan anggaran dari pelaporan keuangan, maka akan diminta agar dana lebih itu dikembalikan ke kas negara.

Fungsional Pemeriksa Madya BPK Perwakilan Kalteng Sumarsana menambahkan, pada kasus pelaporan keuangan perjalanan dinas yang terdapat anggaran berlebih dan ditemukan BPK, pasti BPK akan memberikan surat rekomendasi agar uang tersebut dikembalikan.

“Tapi kita tanya dulu ke pihak yang melakukan perjalanan dinasnya, apa-

kah mereka benar melakukan atau tidak, dan berapa nilainya. Kalau misalkan biaya hotelnya di anggaran tertulis Rp700 ribu, padahal aslinya Rp500 ribu, sisanya dikembalikan,” jelasnya.

“Kalau misalkan dia malah nggak berangkat, semuanya harus dikembalikan,” tambahnya.

Pihak yang melakukan pelaporan tak sesuai riil itu, BPK akan memberikan waktu 60 hari kepada pelaku perjalanan dinas sejak terkonfirmasi oleh BPK. Jika dalam tenggat itu keuangan yang lebih sudah dikembalikan, berarti pertanggungjawaban keuangan pelaku perjalanan dinas tadi telah selesai.

“Kalau lebih dari 60 hari tidak apa-apa kalau misalkan dananya kurang dicicil dulu. Tapi kalau memang tidak mau bayar, mengenai indikasi tindak pidana atau tidak, itu di luar kewenangan kita,” jelasnya. **(dan/uni)**